

VOLUME 51, NO.2, NOVEMBER 2025

Digital Financial Archive Management and Its Supporting Factors at the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

Rina Astuti & Dwiatmodjo Budi Setyarto

Prokrastinasi Akademik Mahasiswa Program Studi Administrasi Perkantoran ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta

P. Tri Anung Sutanto

Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan dan Pembelajaran di Sekolah Marsudirini

Sr. M. Innoceline OSF

Pengurusan Surat Masuk di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Magelang

Seicilia Eka Wulandari & Subiyantoro

Paham Dasar Brand Identity dalam Pembentukan Brand Positioning

Yulius Pribadi

Pengaruh Perubahan Geopolitik Dunia terhadap Relevansi Wawasan Nusantara

Mateus Susanto

JURNAL ILMIAH SOSIAL

Caritas Pro Serviam

ASM MARSUDIRINI SANTA MARIA
YOGYAKARTA

VOLUME 51, NO.2, NOVEMBER 2025

ISSN:1410 4547

<http://asmistmaria.ic.id/wp/jurnal-charitas-prp-serviam>

Jurnal Ilmu Sosial Caritas Pro Serviam diterbitkan enam bulan sekali sebagai media publikasi hasil penelitian dan hasil pemikiran para dosen ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta. Redaksi juga mengundang para penulis, dosen, guru, praktisi dan professional lain untuk mengisi tulisan di jurnal ini sebagai wacana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebijakan dan implementasi kebijakan, praktik dan seni

DEWAN REDAKSI

Penanggung jawab:

Dr. Kristina Wasiyati, S.Pd., M.Hum
Direktur ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta

Penyunting Ahli:

Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Penyunting Bahasa:

- ☐ Dr. Kristina Wasiyati, S.Pd., M.Hum
- ☐ Yohanes Maryono, S.S., M.Hum., M.T.

Penyunting Pelaksana:

- ☐ Lukas Dwiantara, SIP., M.Si.
- ☐ Ch. Kurnia Dyah M., S.Sos., M.M.
- ☐ Indri Erkaningrum F., SE., M.Si.
- ☐ Dwiatmodjo Budi Setyarto, S.Sos., M.P.A.
- ☐ Ignatius Triyana, S.I.P., M.M.

Produksi:

Drs. Paulus Glorie Pamungkas, M.Hum

Administrasi dan Sirkulasi:

Agustinus Iryanto, S.Kom., M.Kom.

DAFTAR ISI

Dewan Redaksi

Daftar Isi

<i>Digital Financial Archive Management And Its Supporting Factors At The Faculty Of Law, Universitas Gadjah Mada.....</i>	1
Rina Astuti & Dwiatmodjo Budi Setyarto	
Prokrastinasi Akademik Mahasiswa Program Studi Administrasi Perkantoran ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta	10
P. Tri Anung Sutanto	
Pendidikan Karakter Melalui Pembiasaan Dan Pembelajaran Di Sekolah Marsudirini.	20
Sr. M. Innoceline OSF	
Pengurusan Surat Masuk Di Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Daerah (Bkppd) Kabupaten Magelang.....	31
Seicilia Eka Wulandari & Subiyantoro	
Paham Dasar <i>Brand Identity</i> Dalam Pembentukan <i>Brand Positioning</i>	50
Yulius Pribadi	
Pengaruh Perubahan Geopolitik Dunia Terhadap Relevansi Wawasan Nusantara	62
Mateus Susanto	

PENGARUH PERUBAHAN GEOPOLITIK DUNIA TERHADAP RELEVANSI WAWASAN NUSANTARA

Mateus Susanto

Abstract

The current developments in global geopolitics have a significant influence on the relevance of Wawasan Nusantara as Indonesia's geopolitical concept. Global dynamics such as great power rivalries, regional conflicts, economic globalization, advances in information technology, and the increasing threats of non-traditional security require Indonesia to adjust its perspective and strategy in maintaining territorial integrity and national unity. These changes impact various aspects of national life, including politics, economy, socio-culture, defense, and national security. Wawasan Nusantara can no longer be understood merely as a normative concept; rather, it must function as an adaptive strategic guideline in facing the complexities of global geopolitics. To respond to these dynamics, a Wawasan Nusantara strategy needs to be implemented comprehensively across various dimensions. First, in foreign policy, Indonesia applies the principle of an independent and active stance grounded in national insight. Second, in the field of defense and security, this strategy emphasizes maritime and continental integration to safeguard national sovereignty. Third, in domestic development, the strategy is realized through strengthening civic defense, developing border regions, and reinforcing national integration as the foundation of national resilience.

Keywords: Global Geopolitics, Archipelagic Insight, National Sovereignty, National Resilience.

A. Pendahuluan

Perubahan geopolitik global perlu mendapatkan perhatian yang serius oleh seluruh komponen bangsa sebagai upaya mempertahankan wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia. Konsep ini berakar pada pandangan Ir. Soekarno tentang pentingnya kesatuan bangsa dan wilayah sebagai dasar negara yang berdaulat, serta dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan, persatuan, dan kesejahteraan (Budiyo, 2009: 6-7). Sebagai bentuk penerapan geopolitik khas Indonesia, Wawasan Nusantara berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh elemen bangsa dalam satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dalam konteks pembangunan nasional, Wawasan Nusantara menjadi strategi integrasi yang mampu memperkuat

rasa kebangsaan, pemerataan pembangunan, serta menjaga keutuhan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan pembangunan, perbedaan sosial-budaya, dan pengaruh globalisasi yang berpotensi melemahkan identitas nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan nilai kebangsaan melalui pendidikan, pemerataan ekonomi, serta adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, Wawasan Nusantara bukan hanya konsep geopolitik, melainkan strategi nasional yang berfungsi menjaga integrasi bangsa dan meneguhkan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, adil, dan berkepribadian di tengah dinamika global.

Wawasan Nusantara merupakan pilar utama geopolitik Indonesia yang

menegaskan kesatuan wilayah, bangsa, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menghadapi tantangan global dan domestik. Meskipun Wawasan Nusantara dan Geostrategi menjadi panduan, Indonesia menghadapi tantangan domestik dan eksternal yang membutuhkan perhatian seluruh elemen bangsa. Dalam wawasan nusantara dan geostrategi dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan di tengah dinamika global (<https://www.mahasiswaindonesia.id/artikel-ideologi2025>), Indonesia menghadapi tantangan dan hambatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tantangan dan hambatan dari dalam negeri sebagai berikut :

1. Menjaga persatuan di tengah keragaman sulit akibat keterbelahan sosial, penyebaran hoaks, dan politik identitas.
2. Kesenjangan pembangunan antar wilayah memicu kecemburuan sosial dan politik, mengikis persatuan.
3. Korupsi dan buruknya tata kelola pemerintahan menghambat pelaksanaan geostrategi dan pembangunan.
4. Pemanfaatan sumber daya alam eksploitatif dan isu lingkungan mengancam kesejahteraan dan kelestarian “wadah” Wawasan Nusantara.
5. Potensi gerakan separatisme (baik bersenjata maupun politik) menuntut penanganan komprehensif.

Sedangkan tantangan dan hambatan dari eksternal adalah :

1. Persaingan strategis AS-Tiongkok di Indo-Pasifik menimbulkan dilema bagi politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
2. Konflik Laut Cina Selatan, IUU Fishing, perompakan, dan kejahatan transnasional mengancam kedaulatan dan keamanan maritim.
3. Serangan digital terhadap infrastruktur dan data menuntut peningkatan ketahanan siber.
4. Perubahan iklim mengancam area pesisir, ketahanan pangan, dan

meningkatkan risiko bencana, mengancam “wadah” fisik Wawasan Nusantara.

5. Gejolak ekonomi global, proteksionisme, dan persaingan investasi menuntut geostrategi ekonomi yang adaptif.
6. Perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme lintas negara tetap menjadi ancaman serius.

Namun dalam kenyataannya, geopolitik dunia akhir-akhir ini, mengalami perubahan yang cukup revolusioner yang tentu akan mempengaruhi cara pandang Indonesia terhadap wilayahnya. Geopolitik Indonesia menuntut untuk beradaptasi terhadap konsep geopolitik yang berwawasan Nusantara.

Indonesia sebagai negara kepulauan strategis dan terletak di persimpangan dunia, selalu dipengaruhi dinamika geopolitik global dan regional. Perubahan konstelasi politik, ekonomi dan isu keamanan global menuntut Wawasan Nusantara sebagai konsep politik bangsa harus terus relevan. Untuk itu internalisasi Wawasan Nusantara dan formulasi strategi yang adaptif sangat penting untuk menjaga keutuhan, memperkuat persatuan, membangun ketahanan, dan berkontribusi pada stabilitas kawasan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, tulisan ini hendak mengkaji dan mendeskripsikan perubahan dinamika geopolitik global dewasa ini memengaruhi relevansi Wawasan Nusantara sebagai geopolitik nasional Indonesia.

B. Pembahasan

1. Dinamika Geopolitik Global

Tahun 2025 menorehkan catatan kelam dalam sejarah geopolitik global. Peta dunia kembali “berdarah”, bukan oleh tinta diplomasi, melainkan oleh senjata, kapal perang, drone, hingga serangan siber termasuk perang ideologi. Untuk diketahui bahwa perang ideologi di era globalisasi ini terjadi, antara lain oleh adanya aspek meningkatnya konektivitas dan aliran

informasi antar negara-negara, yang seiring ini mempercepat penyebaran ideologi. Hal ini tentu saja dapat memperkuat perang ideologi. Oleh karena itu ideologi yang lebih dominan, atau kuat, dapat dengan mudah memengaruhi dan menyebar ke berbagai negara (Kompas.com, 17 Juni 2025)

Dalam era globalisasi banyak hal yang menjadi aspek perang ideologi, antara lain, lewat penyebaran informasi, pengaruh budaya global, serta hubungan ekonomi internasional. Maka di sini lewat penyebaran informasi, di mana kemajuan teknologi komunikasi dan media sosial memungkinkan ideologi dan gagasan politik menyebar lebih cepat dan lebih luas. Negara-negara atau kelompok-kelompok yang memiliki agenda ideologis bisa mencapai audiens global dengan lebih mudah. Perang ideologi modern sering kali berfokus pada isu-isu global, dan pengaruh asimetris dapat menjadi lebih nyata. Negara-negara dengan sumber daya besar, sangat mungkin, memiliki lebih banyak pengaruh dalam mempromosikan ideologi mereka daripada negara-negara kecil atau kelompok minoritas. (<https://www.mahasiswaindonesia.id/artikel-ideologi2025>)

Selain itu, perkembangan terkini dalam perang ideologi global mencakup berbagai aspek, yang di dalamnya memengaruhi hubungan internasional dan dinamika politik di berbagai belahan dunia. Maka terdapat persaingan antara demokrasi liberal dan otoritarianisme. Sementara itu di negara-negara Barat, telah menggoyahkan keyakinan dalam model demokrasi liberal. Beberapa negara mengalami polarisasi politik yang tinggi, populisme, dan penurunan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Hal ini menciptakan ruang untuk penyebaran ideologi yang menantang demokrasi liberal.

Sebagai negara kepulauan, luas dan sebagai negara multi agama, Indonesia tentu tidak lepas dari perang ideologi dunia. Untuk itu perhatian yang serius

untuk menangani perang ideologi harus mendapat perhatian, supaya konflik yang terjadi di luar tidak berimbas pada perpecahan di negara Indonesia. Konsepsi wawasan nusantara perlu selalu didengarkan agar perasaan satu wilayah Indonesia tidak mudah diprovokasi oleh informasi yang mengadu domba.

Selain itu, dalam geopolitik global dewasa ini, permasalahan garis-garis batas negara yang selama puluhan tahun dijaga oleh resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), traktat internasional, dan konsensus pasca-Perang Dunia II, kini kembali dipertanyakan secara terang-terangan. Dunia sedang menghadapi krisis kedaulatan global, di mana konflik perbatasan menjadi wajah paling telanjang dari runtuhnya tatanan internasional (Mearsheimer, J. J.: 2018:23)

Jika pada satu dekade sebelumnya konflik global didominasi perang proksi dan terorisme lintas negara, maka tahun 2025 menandai kebangkitan konflik antarnegara berbatasan. Fenomena ini bukan lagi pengecualian, melainkan pola. Negara-negara semakin berani menguji batas wilayahnya, sementara daya paksa PBB kian melemah. Hukum internasional tetap hidup di atas kertas, tetapi kehilangan napasnya di lapangan.

Perang Rusia–Ukraina menjadi preseden paling brutal dari pergeseran ini. Wilayah direbut, garis peta digeser, dan dunia perlahan dipaksa menerima kenyataan pahit bahwa larangan akuisisi wilayah melalui kekuatan militer—prinsip fundamental Piagam PBB—tidak lagi dianggap sakral. Ketika satu pelanggaran dibiarkan tanpa konsekuensi nyata, pelanggaran lain menemukan legitimasi moral dan politiknya sendiri.

Di kawasan Asia Tenggara, konflik perbatasan Thailand–Kamboja kembali mencuat meskipun telah ada putusan Mahkamah Internasional terkait Preah Vihear, menunjukkan keterbatasan penegakan hukum internasional dalam mencegah konflik berulang (ICJ, 2013; Storey, 2011). Sementara itu, Laut

Tiongkok Selatan terus memanas sepanjang 2025 melalui konfrontasi non-perang antara kapal penjaga pantai Filipina dan Tiongkok, mencerminkan penggunaan *salami tactics* dan strategi abu-abu untuk menggerogoti kedaulatan secara bertahap (Erickson & Martinson, 2019). Dalam situasi ini, ASEAN berada dalam posisi dilematis, terjepit antara solidaritas kawasan dan realitas asimetri kekuatan (Acharya, 2014).

Di Timur Tengah, konflik Palestina–Israel merepresentasikan ironi terbesar sistem global modern. Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai batas wilayah tahun 1967 secara konsisten diabaikan, menciptakan preseden berbahaya bahwa perubahan batas negara melalui kekuatan militer dapat terjadi tanpa konsekuensi tegas (Quigley, 2013). Kondisi ini menandai erosi serius terhadap prinsip *uti possidetis juris*, yang selama beberapa dekade menjadi fondasi stabilitas perbatasan internasional dan pencegah konflik wilayah (Shaw, 1996).

Klaim sejarah, sentimen etnis, serta perebutan sumber daya strategis—mulai dari energi, air, hingga mineral kritis—menjadi bahan bakar utama konflik. Dunia memasuki fase yang dapat disebut sebagai anarki perbatasan, ketika batas negara tidak lagi menjadi kesepakatan global, melainkan arena uji nyali geopolitik. Krisis ini kian kompleks karena pelanggaran kedaulatan tidak selalu hadir dalam bentuk serangan fisik. Serangan siber mampu melumpuhkan pelabuhan dan bandara. Drone otonom memetakan wilayah tanpa izin. Satelit komersial berubah menjadi alat spionase murah dan efektif. (Lemhannas RI, 2020).

Perkembangan kecerdasan buatan mempercepat berbagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan, mulai dari pengawasan, sabotase, propaganda lintas batas, hingga manipulasi data kependudukan (BSSN, 2021). Kedaulatan modern kini tidak hanya soal darat, laut, dan udara, tetapi juga data, algoritma, dan infrastruktur digital (Lemhannas RI, 2020).

Memasuki tahun 2026, berbagai proyeksi strategis memperkirakan bahwa konflik perbatasan tidak akan mereda, melainkan berubah bentuk, dengan ketegangan permanen menjadi kenormalan baru.

Perkembangan kecerdasan buatan mempercepat berbagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan, mulai dari pengawasan, sabotase, propaganda lintas batas, hingga manipulasi data kependudukan. Kedaulatan modern kini tidak hanya soal darat, laut, dan udara, tetapi juga data, algoritma, dan infrastruktur digital. Memasuki tahun 2026, berbagai proyeksi strategis memperkirakan bahwa konflik perbatasan tidak akan mereda, melainkan berubah bentuk, dengan ketegangan permanen menjadi kenormalan baru (Kemhan RI, 2021).

Asia Tenggara, khususnya wilayah maritim strategis, menjadi salah satu kawasan paling rentan terhadap konflik. Serangan siber berbasis AI diperkirakan menasar sistem perbatasan seperti imigrasi, bea cukai, radar, dan logistik (BSSN, 2021). Pada saat yang sama, krisis iklim memperparah situasi melalui banjir, kekeringan, dan kenaikan muka laut, yang memicu migrasi lintas batas (Bappenas, 2021). Konflik perbatasan kini tidak lagi sekadar soal wilayah, melainkan tentang siapa yang berhak bertahan hidup.

Dalam konteks ini, wawasan nusantara menghadapi ujian yang signifikan terkait perkembangan kedaulatan global. Dengan berbatasan langsung dengan sepuluh negara, memiliki ribuan kilometer batas darat dan laut, serta puluhan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Indonesia berada di garis depan dinamika geopolitik kawasan (BNPP, 2025). Perbatasan bukanlah halaman belakang negara, melainkan beranda terdepan kedaulatan.

2. Ancaman pada Wawasan Nusantara dampak Geopolitik Global

Wawasan Nusantara merupakan pandangan holistik bangsa Indonesia

terhadap wilayahnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, yang lahir dari dinamika historis pasca-kemerdekaan untuk menjaga kedaulatan di tengah berbagai ancaman eksternal (Lemhannas RI, 2020). Konsep ini diintegrasikan dalam doktrin geopolitik Indonesia dan menekankan perlunya kesatuan aspek geografis kepulauan dengan kebutuhan strategis nasional, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pertahanan maritim, dan pembangunan wilayah terpencil (Kemhan RI, 2021). Dalam konteks geopolitik kontemporer, di mana Indonesia berada di posisi strategis antara dua samudra dan dua benua, Wawasan Nusantara menjadi landasan penting untuk menghadapi persaingan global seperti dinamika Indo-Pasifik, di mana ancaman maritim, konflik perbatasan, dan persaingan pengaruh geopolitik semakin kompleks akibat dominasi kekuatan global seperti Amerika Serikat dan China (BNPP, 2025). Selain itu, Wawasan Nusantara juga berperan dalam menjaga kesatuan nasional di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya, sehingga setiap kebijakan pertahanan dan pembangunan wilayah harus mempertimbangkan persatuan bangsa. Kunci utama Wawasan Nusantara mencakup: kesatuan wilayah, di mana Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dari Sabang hingga Merauke; kesatuan bangsa, yang menekankan bahwa seluruh warga negara, tanpa memandang perbedaan, adalah bagian integral dari bangsa Indonesia; dan kedaulatan negara, yang menegaskan hak penuh Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri atas wilayah dan sumber dayanya, serta menjaga keamanan nasional dari ancaman eksternal maupun internal (Lemhannas RI, 2020). Kunci Utama Wawasan Nusantara:

- a. Kesatuan Wilayah: Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh, dari Sabang hingga Merauke.
- b. Kesatuan Bangsa: Semua warga negara Indonesia, tanpa memandang suku,

agama, atau budaya, adalah bagian integral dari bangsa Indonesia.

- c. Kedaulatan Negara: Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya dan berhak menentukan nasibnya sendiri.

Dalam konteks geopolitik global, Wawasan Nusantara berfungsi sebagai paradigma geopolitik Indonesia yang bernilai nusantara dan harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan global yang berpotensi menggerus nasionalisme, identitas, dan rasa cinta tanah air. Paradigma ini mencakup cara pandang terhadap diri sendiri dan lingkungan geografis, serta arah visional untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagai negara maritim yang mandiri, berdaulat, dan berperan strategis di kawasan. Namun, dalam era globalisasi dan kompetisi internasional saat ini, ancaman geopolitik semakin kompleks, termasuk persaingan antarnegara besar, konflik maritim, sengketa perbatasan, tekanan ekonomi, dan disrupsi informasi yang melampaui batas wilayah tradisional. Oleh karena itu, penguatan Wawasan Nusantara menjadi sangat penting sebagai landasan pertahanan, pembangunan nasional, dan diplomasi strategis. Ada beberapa ancaman geopolitik global yang paling signifikan meliputi:

- a. **Persaingan Antarnegara Besar di Indo-Pasifik:** Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik menempatkan Indonesia pada posisi yang rentan, terutama di Laut China Selatan, di mana 80% perdagangan global melewati jalur maritim nusantara (Lemhannas RI, 2024). Persaingan ini berpotensi mengancam kedaulatan wilayah Indonesia melalui klaim teritorial, tekanan diplomatik, dan dominasi asing atas sumber daya alam strategis, termasuk energi, mineral, dan jalur logistik penting (BNPP, 2025). Selain itu, ketidakpastian geopolitik ini dapat memicu perlombaan pengaruh asing di wilayah perbatasan, memperlemah posisi Indonesia dalam menentukan

kebijakan nasional. Dalam konteks ini, Wawasan Nusantara menjadi landasan strategis untuk menjaga kesatuan wilayah, melindungi sumber daya nasional, memperkuat pertahanan maritim, dan menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dengan pendekatan yang seimbang antara diplomasi, pertahanan, dan pembangunan berkelanjutan.

- b. **Tantangan Keamanan Maritim dan Ancaman Hibrida:** Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan keamanan maritim yang kompleks, termasuk kejahatan transnasional, terorisme, penyelundupan, dan konflik di Laut China Selatan. Ancaman asimetris dan proxy ini menggerosi pilar Wawasan Nusantara, diperburuk oleh rendahnya kesadaran maritim masyarakat dan infrastruktur yang belum memadai, serta pengaruh globalisasi terhadap identitas nasional (Soemantri et al., 2024). Selain itu, krisis global seperti ketegangan AS-Iran juga berdampak pada harga minyak dan diplomasi Indonesia, menuntut kewaspadaan tinggi dalam menjaga stabilitas regional. Tantangan ini semakin diperkuat oleh penetrasi teknologi baru, termasuk serangan siber terhadap sistem pelabuhan, radar maritim, dan logistik, yang dapat melumpuhkan operasional nasional. Oleh karena itu, penguatan kapasitas maritim, peningkatan kesadaran publik, modernisasi infrastruktur, serta diplomasi proaktif menjadi kunci strategis untuk memastikan Wawasan Nusantara tetap relevan dan efektif dalam menghadapi ancaman tradisional maupun hibrida yang terus berkembang.
- c. **Dampak Globalisasi dan Krisis Kedaulatan:** Arus globalisasi menciptakan fenomena “borderless world” yang dapat menggerus rasa nasionalisme dan menyebabkan ketegangan atas prinsip kedaulatan negara dalam sistem internasional yang

semakin dinamis dan rawan intervensi. Penangkapan Presiden Venezuela secara sepihak oleh militer negara lain dipandang sebagai ancaman serius terhadap prinsip kedaulatan dan tatanan hukum internasional, serta memberikan sinyal peringatan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasionalnya dalam menghadapi tindakan yang berpotensi melemahkan kedaulatan (DPR RI, 2026). Situasi semacam ini menggambarkan bagaimana norma hukum internasional yang selama ini menjadi landasan tatanan global dapat tergerus oleh intervensi kekuatan besar yang tidak melalui mekanisme hukum yang sah. Selain itu, dalam dunia yang semakin terhubung, negara-negara harus menyeimbangkan antara melindungi kedaulatan mereka dan memenuhi kewajiban internasional di tengah tekanan geopolitik global. Kasus geopolitik semacam ini menjadi alarm bahwa hukum internasional yang lemah dapat menjadi ancaman nyata bagi stabilitas dan kedaulatan nasional di tengah dinamika global yang terus berubah.

Beberapa ancaman internal yang paling relevan meliputi:

- a. **Ketimpangan Sosial dan Ekonomi:** Ketimpangan regional dan kelas sosial di Indonesia, terutama antara wilayah timur yang tertinggal dan Pulau Jawa, melemahkan persatuan nasional dan berpotensi memicu sentimen separatisme lokal. Disparitas ini diperburuk oleh dampak geopolitik global, seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang mengganggu rantai pasokan, investasi asing, dan stabilitas ekonomi nasional, sehingga mengikis fondasi Wawasan Nusantara yang menekankan kesatuan ekonomi nasional (Lemhannas RI, 2024). Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dalam akses infrastruktur dan layanan publik, tetapi juga dalam kesempatan kerja, pendidikan, dan

pengembangan teknologi di daerah-daerah tertinggal. Akibatnya, ketidakmerataan ekonomi dapat menimbulkan migrasi internal yang masif, memicu ketegangan sosial, dan melemahkan kohesi sosial. Strategi pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi lokal, pengembangan sumber daya manusia, serta integrasi ekonomi antarwilayah menjadi kunci untuk menjaga integrasi nasional, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan memastikan Wawasan Nusantara tetap relevan di tengah dinamika geopolitik global dan tantangan pembangunan nasional yang terus berkembang.

- b. **Disrupsi Globalisasi dan Budaya:** Era globalisasi membawa arus informasi dan budaya asing yang sering bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti liberalisme, individualisme, dan konsumtivisme, yang berpotensi melemahkan nasionalisme dan identitas kebangsaan (Lemhannas RI, 2024). Generasi muda menjadi kelompok paling rentan terhadap disinformasi digital, propaganda media sosial, dan tren budaya asing yang dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan loyalitas terhadap negara. Fanatisme kedaerahan, stereotip suku, dan kurangnya penghargaan terhadap kebhinekaan semakin berisiko meningkat, terutama di era ketidakpastian geopolitik global 2026. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter, literasi digital, dan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci untuk melindungi persatuan NKRI dan menjaga relevansi Wawasan Nusantara dalam menghadapi disrupsi budaya dan ideologi asing.
- c. **Ancaman Hibrida dan Asimetris:** Ancaman hibrida dan asimetris menjadi tantangan serius bagi keamanan nasional Indonesia, muncul melalui perang informasi, hoaks, dan isu internal yang kontroversial, termasuk isu LGBT, penyimpangan sosial, dan polarisasi agama atau kedaerahan, yang

dapat melemahkan solidaritas nasional. Globalisasi mempercepat penyebaran disrupsi ini melalui media sosial, platform digital, dan arus informasi lintas batas, sementara rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik memicu konflik proxy yang memanfaatkan kerentanan internal Indonesia, termasuk di Laut China Selatan (Lemhannas RI, 2024). Strategi nasional perlu mengintegrasikan pertahanan digital, diplomasi aktif, penguatan literasi publik, serta peningkatan kesadaran kebangsaan untuk menjaga kohesi sosial, melindungi kedaulatan negara, dan memastikan Wawasan Nusantara tetap relevan di era disrupsi hibrida yang semakin kompleks.

- d. **Rendahnya Kesadaran Maritim dan Ketahanan Nasional:** Rendahnya kesadaran masyarakat tentang posisi strategis Indonesia sebagai negara maritim membuat bangsa ini rentan terhadap ancaman eksternal, termasuk eskalasi konflik global seperti di Iran atau wilayah Arktik. Dampak ketidakstabilan global ini dirasakan pada APBN dan nilai rupiah, yang berimbas pada pembangunan infrastruktur maritim, pengawasan perbatasan, dan operasi logistik laut, sehingga melemahkan Wawasan Nusantara sebagai fondasi pertahanan dan integrasi nasional (Lemhannas RI, 2024). Rendahnya literasi maritim masyarakat juga meningkatkan risiko penyelundupan, perompakan, dan konflik di laut. Oleh karena itu, penguatan pendidikan maritim, sosialisasi posisi strategis kepulauan, pembangunan pelabuhan dan pos pengawasan, serta modernisasi sistem logistik dan patroli laut menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketahanan nasional, melindungi kedaulatan Indonesia, dan memastikan stabilitas ekonomi serta keamanan maritim jangka panjang.

3. Strategi Mitigasi untuk Memperkuat Wawasan Nusantara

Strategi Wawasan Nusantara diterapkan melalui berbagai dimensi untuk menghadapi dinamika geopolitik global, termasuk persaingan kekuatan maritim, ancaman non-tradisional, dan risiko hibrida seperti disinformasi dan tekanan ekonomi. Dalam kebijakan luar negeri, Indonesia menegaskan prinsip bebas aktif berdasarkan wawasan kebangsaan, melalui diplomasi ASEAN, Gerakan Non-Blok, dan forum internasional lainnya, untuk memposisikan diri sebagai middle power yang netral, pro-konflik, dan berperan sebagai mediator regional. Pendekatan ini mencakup mendorong multilateralisme, menghindari polarisasi AS-China, mempromosikan stabilitas regional, dan menjaga kepentingan nasional. Diplomasi Indonesia menekankan musyawarah, keadilan, perdamaian, serta perlindungan kedaulatan dan integritas wilayah sebagai fondasi hubungan internasional dan penguatan Wawasan Nusantara (Lemhannas RI, 2024).

Kedua, dalam konteks pertahanan dan keamanan, strategi Wawasan Nusantara menekankan integrasi maritim-kontinental untuk menjaga kedaulatan wilayah, termasuk penguatan armada laut, pasukan keamanan pantai, dan koordinasi antar-lembaga berdasarkan Deklarasi Juanda 1957. Di era kontemporer, strategi ini diperkuat melalui pengelolaan maritim Nusantara, revitalisasi kesadaran bela negara, rekonsiliasi keberagaman, serta pembangunan pendidikan, teknologi, dan infrastruktur untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat. Penguatan wilayah perbatasan sebagai garda terdepan kedaulatan menjadi fokus utama dalam menghadapi tantangan globalisasi, ancaman non-tradisional seperti siber dan hibrida, serta tekanan geopolitik dari rivalitas negara besar. Strategi ini juga mengintegrasikan aspek sosial-budaya dan ekonomi, melindungi kepulauan yang luas, dan memastikan implementasi Wawasan Nusantara secara menyeluruh,

berkelanjutan, adaptif, serta mampu meningkatkan ketahanan nasional dan kedaulatan Indonesia dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks (Lemhannas RI, 2024).

Ketiga, Dalam pembangunan domestik, strategi Wawasan Nusantara melibatkan optimalisasi manajemen bela negara dan filosofi strategi untuk memperkuat integrasi nasional, termasuk melalui pendidikan kewarganegaraan yang menekankan kemampuan berpikir kritis, kreatif, analitis, dan reflektif, sekaligus menghargai kebhinekaan sebagai kekayaan bangsa. Strategi ini memanfaatkan geopolitik untuk membangun ketahanan nasional, dengan fokus pada konektivitas maritim Selatan-Selatan, kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, serta penguatan identitas dan budaya nasional. Di konteks Indo-Pasifik, Wawasan Nusantara digunakan untuk menghadapi tantangan seperti sekuritisasi konflik Laut China Selatan, yang memengaruhi keamanan maritim, jalur perdagangan, dan stabilitas ekonomi. Strategi adaptif ini juga mendorong pembangunan industri perkapalan nasional, modernisasi infrastruktur maritim, serta integrasi pembangunan wilayah perbatasan sebagai garda terdepan kedaulatan. Pendekatan ini memastikan implementasi Wawasan Nusantara berlangsung menyeluruh, berkelanjutan, dan mampu merespons dinamika global yang terus berkembang (Lemhannas RI, 2024).

C. Penutup

Wawasan Nusantara menjadi pedoman strategis bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan geopolitik global. Secara konseptual, geopolitik menjelaskan pengaruh faktor geografis terhadap politik dan kebijakan negara, sementara Wawasan Nusantara menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam keragaman wilayah, budaya, dan masyarakat. Implementasi konsep ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan nasional serta melindungi kedaulatan

Indonesia dari berbagai ancaman. Ancaman eksternal meliputi persaingan antarnegara besar di kawasan Indo-Pasifik, tantangan keamanan maritim, ancaman hibrida, dan dampak globalisasi terhadap kedaulatan. Sementara itu, ancaman internal mencakup ketimpangan sosial dan ekonomi, disrupsi budaya akibat globalisasi, rendahnya kesadaran maritim, serta ancaman asimetris dan hibrida.

Untuk menghadapi dinamika tersebut, strategi Wawasan Nusantara diterapkan melalui berbagai dimensi. Pertama, dalam kebijakan luar negeri, Indonesia menegaskan prinsip bebas aktif dan diplomasi berbasis wawasan kebangsaan. Kedua, dalam pertahanan dan keamanan, strategi ini menekankan integrasi maritim-kontinental, penguatan armada laut, dan pengelolaan wilayah perbatasan. Ketiga, dalam pembangunan domestik, strategi ini melibatkan optimalisasi manajemen bela negara, pendidikan kewarganegaraan, serta pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya untuk memperkuat integrasi nasional. Dengan penerapan yang menyeluruh, Wawasan Nusantara memastikan Indonesia mampu menghadapi tekanan global, menjaga persatuan, dan mempertahankan kedaulatan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2014). *Constructing A Security Community In Southeast Asia* (2nd ed.). Routledge.
- Bakamla RI. (2022). *Laporan Tahunan Keamanan Maritim Indonesia*. Jakarta: Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- BNPP. (2025). *Perbatasan Indonesia: Dinamika geopolitik dan keamanan regional*. Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- Bappenas RI. (2022). *Strategi Pembangunan Nasional dan Integrasi Wilayah*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Budiyono, Kabul. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, ALFABETA, Bogor, 2009
- DPR RI. (2026). *Ketahanan Nasional Dan Geopolitik Global: Laporan Penelitian*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Erickson, A. S., & Martinson, R. D. (2019). China's Maritime Gray Zone Operations. *Naval War College Review*, 72(1), 7–36.
- International Court of Justice. (1986). *Frontier Dispute (Burkina Faso v. Mali), judgment*. ICJ Reports.
- International Court of Justice. (2013). *Request For Interpretation Of The Judgment Of 15 June 1962 In The Case Concerning The Temple Of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)*.
- Kemhan RI. (2021). *Pertahanan dan Keamanan Nasional: Tantangan Kontemporer*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kemhan RI. (2023). *Modernisasi Pertahanan Maritim Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Lemhannas RI. (2020). *Ketahanan Nasional Dalam Perspektif Globalisasi*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Lemhannas RI. (2024). *Wawasan Nusantara dan Strategi Geopolitik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Mazarr, M. J. (2015). *Mastering The Gray Zone: Understanding A Changing Era Of Conflict*. RAND Corporation.
- Megawati, M. (2024). *Globalisasi dan Krisis Kedaulatan: Analisis Geopolitik Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Geopolitik.
- Mearsheimer, J. J. (2018). *The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities*. Yale University Press.

Soemantri, A.I., dkk. (2024). *Keamanan Maritim Dan Geopolitik Indonesia*. Jakarta: Lemhannas RI.

<https://mahasiswaindonesia,2025>)Konflik Ideologi dan Konsensus Politik: Tantangan dalam Demokrasi Modern)

[https://BNPP.go.id/berita/Garis Peta yang Berdarah: Krisis Kedaulatan Global 2025–2026 dan Ujian Nyata Perbatasan Indonesia \).](https://BNPP.go.id/berita/Garis_Peta_yang_Berdarah:_Krisis_Kedaulatan_Global_2025-2026_dan_Ujian_Nyata_Perbatasan_Indonesia_)

[https://www.kompas.com/tren/read/2025/06/17/050000665/benarkah-perang-dunia-iii-semakin-dekat-ini-10-konflik-utama-di-2025?utm_source=chatgpt.com.](https://www.kompas.com/tren/read/2025/06/17/050000665/benarkah-perang-dunia-iii-semakin-dekat-ini-10-konflik-utama-di-2025?utm_source=chatgpt.com)
17Juni 2025

BIODATA PENULIS

1. **Rina Astuti**, lahir di Kulon Progo tanggal 3 Oktober 2004. Tahun 2025 menyelesaikan pendidikan DIII Program Studi Administrasi Perkantoran ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta.
2. **Dwiatmodjo Budi Setyarto**, lahir di Jakarta tanggal 22 Januari 1974. Tahun 1997 menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Ilmu Administrasi, Prodi S1 Administarsi Negara, Universitas Diponegoro Semarang. Tahun 2012 menyelesaikan S2 Manajemen dan Kebijakan Publik/Master of Public Administration di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tahun 2006 mulai mengajar di ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta sebagai dosen DPK LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta. Matakuliah yang diampu: Tata Persuratan Dinas, Manajemen Arsip Inaktif dan Statis, MSDM, dan Metodologi Penelitian.
3. **Paulus Tri Anung Sutanto**, lahir di Yogyakarta tanggal 15 Juni 1976. Tahun 2001 menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tahun 2010 menyelesaikan pendidikan S2/Master of Art Psikologi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sekarang menjadi dosen tetap Program Studi Administrasi Perkantoran ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta. Mata kuliah yang diampu: Pengembangan Diri, Manajemen Kearsipan, Teknologi Perkantoran, Aplikasi Komputer Pengolah Kata. Jabatan Fungsional: Lektor.
4. **Sr. M. Innoceline OSF**, lahir di Flores- Maumere, 29 September 1972. Tahun 2003 menyelesaikan studi D2 PGSD Soegiopranata di Bawen, Tahun 2014 menyelesaikan pendidikan S1 PGSD di Universitas Terbuka di Kupang, Tahun 2003 sampai tahun 2025 menjadi guru dan kepala sekolah di Taman Kanak- Kanak dan Sekolah Dasar Marsudirini. Tahun 2025 menyelesaikan pendidikan S2 Magister Managemen di Universitas Sanata Dharma. Tahun 2025 sampai sekarang bekerja di ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta sebagai Wakil Direktur 2 bagian umum dan perencanaan.
5. **Seicilia Eka Wulandari**, menyelesaikan pendidikan DIII Program Studi Administrasi Perkantoran ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta pada Tahun 2025.
6. **Subiyantoro**, lahir di Sleman, 7 September 1969. Tahun 1993 menyelesaikan S1 Administrasi Negara, Fisip Universitas Sebelas Maret Surakarta Menyelesaikan S2 Program Studi Administrasi Negara Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sejak Oktober 1995 menjadi dosen tetap ASMI Santa Maria Yogyakarta. Mata kuliah yang diampu: Dasar Dasar Bisnis, MSDM, Tata Persuratan Dinas dan Tata Persuratan Bisnis. Jabatan akademik: Lektor
7. **Yulius Pribadi**, lahir di Sleman tanggal 5 Juli 1973. Tahun 2002 menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tahun 2012 menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Studi Manajemen Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sejak Tahun 2002 sampai sekarang menjadi dosen tetap ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta. Mata Kuliah yang diampu : Government

Relations, Manajemen Kritis, Aplikasi komputer Kehumasan, Desain Grafis, Fotografi, Strategi Komunikasi Pemasaran, Retorika.

8. **Mateus Susanto**, lahir di Yogyakarta 21 September 1966. Tahun 1991 menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Administrasi Negara Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tahun 2000 menyelesaikan pendidikan S2 Program Studi Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mata kuliah yang diampu: Teknologi Perkantoran, Manajemen Kearsipan, Kewirausahaan dan Pancasila. Jabatan fungsional: Asisten Ahli

**PETUNJUK BAGI PENULIS
JURNAL ILMU SOSIAL CARITAS PRO SERVIAM**

1. Naskah merupakan suatu kajian masalah bidang Ilmu Ekonomi, Sosial dan Humaniora baik hasil penelitian maupun hasil pemikiran yang belum pernah dipublikasikan. Naskah ditulis berdasarkan kaidah penulisan Bahasa Indonesia yang baik dan benar Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Naskah diketik dengan huruf Times News Roman, ukuran 12, spasi ganda, dicetak di atas kertas HVS ukuran kwarto sebanyak 10-30 halaman.
2. Judul tidak lebih 12 kata, ditulis dengan huruf kapital 14, spasi tengah
3. Nama penulis dicantumkan tanpa gelar
4. Abstrak ditulis dalam satu paragraph, maksimum 200 kata, dengan ketikan spasi 1 dan dicetak miring. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris bagi naskah Bahasa Indonesia dan ditulis dalam Bahasa Indonesia bagi naskah Bahasa Inggris. Abstrak disertai kata-kata kunci (*key words*)
5. Sistematika naskah hasil penelitian:
 - a. Judul
 - b. Abstrak
 - c. Pendahuluan
 - d. Metode Penelitian
 - e. Hasil dan Pembahasan
 - f. Kesimpulan dan Saran
 - g. Daftar Pustaka
6. Sistematika naskah hasil Pemikiran:
 - a. Judul
 - b. Abstrak
 - c. Pendahuluan
 - d. Pembahasan
 - e. Penutup atau Kesimpulan
 - f. Daftar Pustaka
7. Ketentuan Penulisan Daftar Pustaka
 - a. Penulis diurutkan berdasarkan alfabetis, nama akhir/ keluarga sebagai urutan pertama atau nama institusi yang bertanggung jawab atas tulisan. Nama penulis diakhiri tanda titik (.)
 - b. Tuliskan tahun terbit karya pustaka dan diakhiri tanda titik (.)
 - c. Tuliskan judul karya pustaka dari seorang penulis lebih dari satu, penulisan diurutkan secara kronologis waktu penerbitan
 - d. Penulisan referensi dari internet terdiri: judul, penulis, alamat website dan keterangan akses/ *down load*
8. Gambar, grafik, dan tabel disajikan dengan diberi nomor urut dan sumber

9. Biodata ditulis dalam bentuk narasi memuat nama lengkap, tanggal dan tempat lahir, keterangan selesai pendidikan S1/S2/S3, pekerjaan, alamat e mail, bidang kerja/ bidang ajar dan karya ilmiah yang pernah ditulis \
10. Naskah yang dikirim dapat:
 - a. Diterima tanpa perbaikan
 - b. Diterima dengan perbaikan dari redaksi
 - c. Diperbaiki oleh penulis dan dipertimbangkan dalam rapat dewan redaksi
 - d. Ditolak karena kurang memenuhi syarat